



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KOMISI IX DPR RI**

- Tahun Sidang : 2018-2019
- Masa Persidangan : V (Lima)
- Rapat ke : 2
- Jenis Rapat : Rapat Kerja & Rapat Dengar Pendapat
- Hari, Tanggal : Selasa, 14 Mei 2019
- Waktu : 13.00 s.d selesai
- Tempat : Ruang Rapat Komisi IX DPR RI  
Gedung Nusantara I Lantai I
- Ketua Rapat : DR. H. Saleh Partaonan Daulay, M.Ag, M.Hum, MA/Wakil Ketua  
Komisi IX DPR RI
- Sekretaris Rapat : Yanto Supriyanto/Kabag.Set Komisi IX DPR RI
- Acara : 1. Membahas Hasil Review BPKP dan Penanggulangan Defisit  
JKN;  
2. Membahas Kebijakan Penanganan Penyakit Katastropik,  
Termasuk Alternatif Pembiayaan Inovatif.
- Hadir : **A. ANGGOTA KOMISI IX DPR RI**

27 orang Anggota dari 51 Anggota Komisi IX DPR RI

**B. PEMERINTAH :**

1. Menteri Kesehatan RI, Prof. DR. dr. Nila F. Moeloek SpM (K) beserta jajaran;
2. Menteri Keuangan RI, diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan RI, Mardiasmo, MBA, Akt beserta jajaran;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Ardan Adiperdana beserta jajaran;
4. Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Ir. Tubagus Achmad Choesni, MA, M.Phil beserta jajaran;
5. Dirut BPJS Kesehatan, Prof. Dr. dr. Fahmi Idris, M.Kes beserta jajaran.

**KETUA RAPAT (DR. H. SALEH PARTAONAN DAULAY, M.AG, M.HUM, MA/F-PAN):**

***Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.***  
**Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua.**

**Yang saya hormati Saudara Menteri Kesehatan RI, beserta seluruh jajaran yang hadir, Saudara Wakil Menteri Keuangan RI, Saudara Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Beserta seluruh jajaran yang hadir, Saudara Ketua Jaminan Dewan Jaminan Sosial Nasional (JDJSN) Saudara Dirut Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan atau yang mewakili yang hadir pada hari ini, Saudara-saudara Pimpinan dan seluruh anggota Komisi IX DPR-RI, dan Hadirin yang berbahagia.**

Pertama sekali marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena pada Siang menjelang sore hari yang berbahagia ini, kita diberikan waktu untuk dapat berkumpul di ruangan yang berbahagia ini dalam rangka melakukan rapat terkait dengan penyelesaian masalah BPJS Kesehatan.

Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Sekretariat Komisi IX DPR-RI, bahwa jumlah anggota yang sudah menandatangani daftar hadir adalah 10 anggota dari 6 Fraksi yang hadir dan yang menyampaikan izin ada 5 orang. Karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Peraturan DPR-RI tentang tata tertib, maka rapat ini dinyatakan telah memenuhi kuorum. Dengan demikian atas izin kita semua, maka rapat ini dinyatakan dibuka dan dibuka untuk umum.

**(RAPAT : SETUJU)**

**(RAPAT DIMULAI PUKUL 13:49 WIB)**

Baik Bapak-Ibu, Saudara mengenai waktu rapat untuk sementara ini kita mulai pada Pukul 13.50 ya. Nanti mungkin paling lama 1 jam. Setuju tidak ini. Nanti kita dengar dulu penjelasan-penjelasan yang terkait dengan tadi ada rapat informal tadi sebentar di dalam dengan para mitra kerja. Jadi kita minta pendapat dari teman-teman juga terkait dengan waktu.

Setuju tidak sampai Pukul 15.00 WIB.

Hallo sebelah kiri setuju ya?

**(RAPAT : SETUJU)**

la kita mulai rapatnya.

Agenda Rapat kita hari ini:

1. Sebetulnya agendanya adalah membahas hasil review BPKP dan Penanggulangan defisit JKN.
2. Agendanya membahas Kebijakan Penanganan penyakit Katastropik yang dalam kaitan ini tentu saya dengan JKN, termasuk alternatif pembiayaan Inovatif yang diajukan oleh pemerintah dalam penanggulangan defisit anggaran yang dialami oleh BPJS.

Bapak-Ibu, Saudara saya ingin menawarkan pada kita dulu peserta rapat khususnya anggota Komisi IX, Pimpinan Komisi IX. Tadi dirapat informal, itu kita menyepakati bahwa rapat ini kemungkinan akan diundur, karena Dirut BPJS kebetulan pada hari ini sedang Cuti, jadi tidak bisa hadir. Sementara rapat ini sangat penting untuk menyelesaikan masalah yang ada di BPJS. Nah saya mau menawarkan

kepada kita, apakah kita menyetujui rapat ini diundur atau ada pandangan lain atau pendapat lain. Saya mulai dari kiri dulu.

Silakah

**F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):**

Terima kasih Pimpinan.

**Bapak-bapak, Ibu sekalian.**

Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Keuangan, BPKP dan undangan yang sudah memang ditentukan Komisi IX untuk hari ini menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan soal BPJS. Kami terus terang sangat menyesalkan karena Dirut BPJS tidak hadir, karena domainnya ini dia harus hadir karena berkaitan dengan urusan BPJS. Nah kalau katakanlah alamatnya tidak datang, ia saya kira saya setuju ditunda pimpinan. Tapi satu komitmen bahwa yang hadir pada hari ini, sore ini juga jangan ada lagi nanti setelah ditentukan jadwalnya juga ada yang berhalangan. Nah saya kira komitmen itu penting karena apa, karena ini sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat kita berkaitan dengan apa yang selama ini keluhan-keluhan berkaitan dengan pendanaan di BPJS. Nah saya kira Pimpinan saya usulkan bisa ditentukan tanggalnya dan agar diketahui juga oleh publik, bahwa kita akan rapat tanggal berapa, agar semua tahu bahwa penundaan rapat pada hari ini karena Dirut BPJS tidak hadir. Yang semestinya bisa disampaikan sebelum hari ini, karena saya tidak tahu mendadak sekali, diberi tahu hari ini bahwa tidak hadir. Karena undangan dari komisi sudah dilayangkan tidak mendadak.

Nah saya kira Pimpinan demikian usul kami, terima kasih.

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

**KETUA RAPAT:**

Baik, sebelah Kanan, Ibu Putih Sari atau Pak Syamsul.

Silakan Ibu Putih Sari.

**F-GERINDRA (drg. PUTIH SARI):**

Ia Pimpinan.

Saya kira sependapat dengan rekan terdahulu yang telah menyampaikan, bahwa focus kita ini terkait dengan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional, dimana BPJS sebagai penyelenggara, pengelola dari JKN ini dan tentu titik permasalahan dari apa yang ingin kita elaborasi hari ini adalah terkait dengan BPJS itu sendiri. Tentu sangat disayangkan Dirut dari BPJS Kesehatan tidak bisa hadir dan sangat mendadak pemberitahuannya, justeru ketidakhadiran beliau semoga ini bisa menjadi evaluasi kedepan bagaimana kemitraan Komisi IX dengan BPJS Kesehatan. Jadi kalau memang untuk adanya penundaan pembahasan rapat hari ini, saya kira bisa disetujui Pimpinan, tapi juga sependapat bahwa kedepan untuk agenda selanjutnya untuk bisa dipastikan, bahwa semua stakeholder terkait pelayanan BPJS Kesehatan ini memastikan untuk hadir untuk kita bisa sama-sama membahas ini secara serius, karena ini menjadi persoalan yang sangat penting yang dihadapi oleh masyarakat hari ini.

Itu saja Pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih.

Ada lagi tidak ini kira-kira yang mau menyampaikan. Ibu Amelia Anggraini silakan dari Nasdem.

**F-NASDEM (AMELIA ANGGRAINI):**

Terima kasih Pimpinan.

**Pimpinan dan rekan-rekan anggota Komisi IX yang saya hormati,  
Ibu Menteri Kesehatan dan jajaran yang saya hormati.**

Saya sepakat dengan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Putih tadi, karena intinya pertemuan hari ini kita perlukan juga Dirut BPJS nya, banyak yang mau tanyakan, banyak yang kita mau bahas. Saya sepakat ditunda saja Pimpinan sampai lengkap.

**KETUA RAPAT:**

Baik terima kasih Ibu Amelia Anggraini yang cukup sangat tegas ya pada hari ini, ini agak berbeda hari ini, tegas.

Baik, Bapak Ibu.

Saya kira cukup ya.

Oh, Ibu, silakan Bu.

**F-GERINDRA (DR. SUMARJATI ARJOSO, S.K.M.):**

Terima kasih Pimpinan.

**Yang terhormat Pimpinan, teman-teman sekalian dan mitra kerja yang saya hormati.**

Saya sepakat, bahwa yang tentang BPJS tadi ditunda, namun ada juga masalah yang sekarang banyak menjadi pertanyaan adalah tentang kematian pada petugas KPPS yang sudah 554 dan begitu ribuan lagi yang sakit. Ada 13 kematian yang disampaikan oleh Kementerian Kesehatan dan hampir semuanya penyebabnya itu seperti juga penyakit-penyakit yang Katastropik. Bukan Pak, penyebab kematian sudah disampaikan kesehatan terhadap petugas KPPS saya sudah punya Pak, ini dari Kemkes. Lalu juga ada dari IDI yang kemarin rapat untuk membahas hal tersebut. Barangkali kalau boleh diijinkan hari ini kita bahas sedikit, karena ini juga banyak menjadi pertanyaan masyarakat.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik.

Silakan Pak Mafirion.

**F-PKB (H. MAFIRION):**

Terima kasih Pimpinan.

Teman-teman anggota,

**Bapak-Ibu yang saya hormati.**

Saya pikir jangan ditundalah ini, lanjut saja. Toh ini urusannya dengan pemerintah ini. Kalau BPJS ini hutangnya mau diselesaikan, kalau Dirutnya tidak hadir tidak apa-apa, ada Menteri Kesehatan ada Wakil Menteri Keuangan. Saya pikir kita lanjutkan saja, jangan ditunda.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, ada lagi tidak ini dari anggota, nanti saya mau tanya ke Pemerintah, ini ada dua pendapat berarti, justeru tiga sebetulnya, ada yang tidak dilanjutkan, ada dilanjutkan, ada yang dilanjutkan saja tapi penjelasan terkait dengan urusan masyarakat yang lain. Dari kita cukup ya, cukup dulu.

Nah sekarang saya minta dari Pemerintah dulu, dari Menteri Kesehatan dulu.

**MENTERI KESEHATAN RI:**

Baik terima kasih Bapak Ketua Komisi IX DPR-RI,  
Wakil Ketua dan para anggota Komisi IX DPR-RI,

Saya kira memang ini rapat sudah direncanakan agak jauh hari. Saya mengatakan apa yang sebenarnya pada Hari Jumat kami berkumpul untuk membicarakan hasil audit BPKP, pada waktu itu kita sudah mengetahui Selasa ini akan ada rapat dengan DPR, namun melihat hasil audit BPKP ini yang saya kira sudah begitu bekerja keras untuk mengaudit, mereview 100% ya Pak ya. Jadi total 100% dari seluruh Rumah Sakit dan saya kira banyak persoalan yang seharusnya sebaiknya Direktur BPJS ini hadir. Jadi saya kira ini harus memang banyak penyelesaian harus dipikirkan untuk kedepannya, yang harus diputuskan juga oleh BPJS.

**KETUA RAPAT:**

Terkait usulan Ibu tadi soal penjelasan sedikit terkait dengan petugas-petugas KPPS. Kan itu usulan juga.

**MENTERI KESEHATAN RI:**

Ya kalau memang diminta oleh Komisi IX, tentu kami bersedia.

**KETUA RAPAT:**

Baik.  
Pak Wakil Menteri Keuangan bagaimana Pak?

**WAKIL MENTERI KEUANGAN:**

Terima kasih Pak.

**Yang saya hormati Pimpinan dan anggota Komisi IX yang berbahagia.**

Seperti Ibu Menteri Kesehatan dan tadi sudah saya lapor langsung pada Ibu Menteri Keuangan dan juga kalau berkenan direschedule saja Pak.

Demikian.

**KETUA RAPAT:**

Dari BPKP Pak?

**BPKP:**

Terima kasih Bapak Pimpinan.  
Saya sependapat dengan Menteri Kesehatan dan Wakil Menteri Keuangan.  
Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Dari DJSN silakan Pak.

**DJSN:**

Terima kasih Pak Pimpinan.  
Saya juga setuju untuk karena banyak masalah yang harus ditelaah dengan pimpinan tertinggi,  
saya setuju untuk penundaan.  
Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terakhir dari BPJS Kesehatan Pak. Pak Wahidin.

**BPJS KESEHATAN:**

Terima kasih Pak.  
Apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri Kesehatan, Wakil Kemenkeu dan BPKP dan DJSN,  
kami ikut terhadap.

**F-PG (IR. ICHSAN FIRDAUS):**

Saya interupsi sebentar.

**Interupsi.**

Saya mau tanya dulu, penjelasan surat Cuti ini kalau boleh kami tahu, ini biar publik tahu ya.  
Itu alasannya kenapa cuti. Biar kita tahu semua, biar kita tahu secara rasionalnya seperti apa.  
Silakan Pak.

**BPJS KESEHATAN:**

Terima kasih Pak.  
Saya ingin sampaikan bahwa Dirut BPJS cuti hanya hari ini, karena menghadiri Wisuda  
anaknya di Palembang. Mungkin itu Pak.  
Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Pak Abidin.

**F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):**

Justeru itu yang harus bertanggung jawab Dirut BPJS. Kalau ditunda pastikan juga, jangan lagi ada cuti lagi, nanti Wisuda lagi, ada lagi begitukan. Jadi ini mohon maaf Pak, ini kan sudah direncanakan sejak awal, jadi bukan dadakan kita rapat. Seharusnya diberitahukan sejak awal juga kalau memang wisuda. Wisuda itu bukan dadakan, bukan seperti orang mau tadarus itu, tadarus-tadarus atau di Bulan Puasa, wisuda itu sekedar jadwalnya. Nah oleh karena itu teman-teman Dirut BPJS pastikan betul, kalau itu nanti penundaan itu harus hadir Dirutnya, jangan sampai nanti hari yang sama juga ada surat cuti ke Komisi IX.

Saya kira ini penegasan Pimpinan, karena kita tahu bahwa rapat ini tidak terlaksana, karena Dirut BPJS nya berhalangan. Nah itu semuanya jadi repot kan, ada Ibu Menteri nya sudah hadir, Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Keuangan dan yang lain.

Saya kira ini menjadi catatan kita pimpinan, agar disampaikan secara benar kepada Dirut BPJS, dikonfirmasi dulu. Kalau ditentukan katakanlah kita menentukan tanggalnya. Menentukan tanggal disampaikan betul harus hadir. Jadi jangan nanti ada lagi wisuda lagi itu kan. Saya kira itu.

Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baik terima kasih.

Saya minta persetujuan, berarti kita tunda ya.

Setuju ya?

**F-PG (IR. ICHSAN FIRDAUS):**

Sebentar dulu Ketua.

Kita sepakati dulu, tunda tanggal berapa, sampai tanggal berapa kita mulai, habis itu baru kita tentukan, ketok dulu.

**KETUA RAPAT:**

Setuju ditunda ya.

Nah Pak Yanto tadi tanggal berapa?

Kita akan tunda sampai tanggal 27 Mei 2019.

Setuju ya?

Tadi sudah disepakati. Pemerintah setuju ya?

**PEMERINTAH:**

Setuju.

**KETUA RAPAT:**

BPJS setuju?

**F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):**

Terkonfirmasi belum itu?

**BPJS KESEHATAN:**

Kalau kita lihat jadwal tanggal 27 Sore setuju dan Pak Dirut akan hadir.

**F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):**

Bukan, sudah berkomunikasi belum dengan Pak Dirutnya? Sudah kalau sudah jam begini sudah selesai.

**BPJS KESEHATAN:**

Nanti kami akan komunikasikan Pak, pastikan bahwa hadir bahwa tanggal 27.

**KETUA RAPAT:**

Oke, ini penanggung jawab Pak Wahidin ini.

**F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):**

Didengar publik jangan sampai ini lagi. Kalau ini bisa soal lagi ini, karena ditunggu oleh masyarakat luas Pak.

**KETUA RAPAT:**

Tanggal 27 ya setuju? 27 Mei 2019.

**(RAPAT : SETUJU)**

Baik, ini tadi usulannya Ibu Sumaryati. Mohon maaf Ibu. Tadi sudah soal KPPS ini. Sebetulnya begini. Ini kan menjadi polemik, harusnya tidak menjadi polemik, karena Kementerian Kesehatan sudah melakukan investigasi. Kita percaya kepada Kementerian Kesehatan. Jadi karena itu harusnya Menteri Kesehatan juga menjelaskan juga pada kita bicara formal di DPR-RI.

Saya mohon ijin pada mitra yang lain dulu mendengarkan sebentar saja Pak, terkait dengan soal masalah dengan petugas KPPS ini, supaya polemik ini berhenti, jangan ada spekulasi. Itu satu. Yang kedua, ada isu soal cacar monyet apa itu bu yang dari Singapura. Nah itu juga kita belum juga dapat laporan itu. kira-kira seperti apa, berbahaya tidak untuk Indonesia, karena negara kita ini luas sekali. Jadi ini kan mungkin bisa dijelaskan juga terkait dengan ini.

**F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):**

Pimpinan sedikit pimpinan.

Saya juga ada hal ingin kami sampaikan, tapi khusus untuk Kementerian Kesehatan dan ini saya berharap bisa terselesaikan, karena berkaitan dengan Kementerian Kesehatan, berkaitan dengan pengaduan dari dokter Ibu di Kupang. Yang diangkat oleh Ibu Menteri, bukan dokternya pribadi bukan. Ibu kan punya dokter di P2P, pencegahan penyakit ya. Nah Ibu mengeluarkan surat pemecatan



terhadap yang bersangkutan. Nah ini menimbulkan masalah. Nah saya kira katakanlah ini diteruskan, banyak hal yang harus diperbincangkan berkaitan dengan Kementerian Kesehatan. Saya khawatir ini tidak akan habis-habis. Jadi banyak soal ini khusus kita nanti RDP, nanti akan saya sampaikan bu, saya sudah ada bahannya ini. Ini ada pemecatan itu di kementerian Ibu dan saya secara umum untuk minta ditinjau ulang, karena ini menarik kasusnya, karena dokter ini membongkar pungli di pelabuhan karena dia dokter kesehatan di pelabuhan itu. lalu dia yang dipecat, dokumennya ada semua disini. Nah itu. Kalau mau dipanjang-panjangkan saya bisa ini dokumen.

**KETUA RAPAT:**

Sebenarnya tidak ada masalah Pak Abidin, walaupun mau disampaikan itu tidak ada masalah juga. Itu kan aspirasi masyarakat yang Bapak sampaikan, kewajiban Bapak untuk menyampaikan itu.

**F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):**

Justeru itu saya sampaikan.

**KETUA RAPAT:**

Dan kementerian kesehatan juga tidak keberatan untuk menjawab itu. Nah sekarang Pak Ichsan dulu.

**F-PG (IR. ICHSAN FIRDAUS):**

Terima kasih Ketua.

Saya pikir kita ini agendanya adalah terkait BPJS Kesehatan, terkait dengan bagaimana audit BPKP dan penanganan defisit BPJS Kesehatan kedepan. Kalau tadi ada usulan agenda, menurut saya juga kita juga harus menyusun agenda baru Pak ketua. Karena saya yakin juga Ibu Menteri Kesehatan dan perangkatnya juga, kalau kemudian hanya menjelaskan sesaat tanpa disertai dengan data-data yang lengkap, ini kita harus juga sesuai dengan alurnya. Kalau saran saya lebih baik ditunda saja dulu, tetapi pertanyaan-pertanyaan tadi itu dipersiapkan secara matang, karena nanti Ibu Menteri kalau ditanya terkait dengan meninggalnya KPPS misalnya, itu datanya yang ada di meja Ibu Menteri saja, tapi tidak lengkap. Jangan sampai berasumsi terlalu jauh. Ini ruang publik, ini ruang DPR begitu. Jangan kemudian karena hanya sekedar berasumsi, kemudian ada data. Memang ada datanya kita tahu, tapi apakah dibawah atau tidak, karena agenda hari ini agendanya terkait BPJS.

Nah kalau kemudian Ibu Menteri ingin menjawab, menurut saya kita cari agenda waktu yang tepat dan kita susun agendanya dan ini menjadi catatan Komisi IX bahwa kita akan mengagendakan hal tersebut, termasuk apa yang diusulkan oleh Pak Abidin tadi begitu. Kalau saran saya begitu.

**KETUA RAPAT:**

Baik.

Bagaimana Ibu Sumardiyati.

**F-GERINDRA (DR. SUMARJATI ARJOSO, S.K.M.):**

Sebetulnya begini, kalau kita tunda ya bagus juga waktunya, tapi secepatnya, karena ini sudah menjadi masalah publik. Publik ingin tahu. Yang ditujukan BPJS, yang untuk Ibu menteri mungkin beda. Kalau kita lihat agenda kita, kita banyak mulainya itu siang hari, mungkin bisa pagi hari, Jam

10-12. Saya kira bisa kita tanda waktu saya lihat agendanya kok banyaknya dimulai itu Jam 12, Jam 01.

**KETUA RAPAT:**

Jadi begini, tadi sebetulnya soal waktunya Ibu Menteri, karena beliau harus mengikuti satu pertemuan dengan WHO, itu tadi sudah kita cari waktunya memang tidak ada waktunya, kecuali tanggal 27 tadi dan itu pun hanya untuk membicarakan soal BPJS tadi ini. Nah kalau misalkan kita tunda lagi, ini kan ada waktu, sementara masalahnya kan adanya sekarang. Kalau sudah tanggal 27 nanti sudah tidak ada lagi masalah, Insha allah tidak ada masalah lagi. Tapi kita kita sekarang kalau seperti saya ditanyakan sama Wartawan, saya tidak begitu paham menjelaskannya, nanti salah bicara bagaimana. Jadi makanya ia menteri sudah menjelaskan, tapi tentu juga kita perlu mengetahui secara formal begitu lho, termasuk yang penyakit cacar monyet itu lho. Berbahaya Cacar Monyet ini, kalau saya lihat gambarnya itu bahaya sekali. Kalau memang disepakati sebentar termasuk Pak Abidin juga tidak apa-apa, tadi Bapak-bapak yang lain juga tidak keberatan. Nah kalau soal jadwal kita bisa sepakati perubahan jadwal di rapat ini.

Silakan Pak Syam.

**F-PG (SYAMSUL BACHIR):**

la saya kira memang tidak boleh ada agenda mendadak, jadi rapat resmi dan harus mengambil keputusan. Jadi kalau ada usulan-usulan baru tadi boleh-boleh saja, tapi sifatnya informatif, tidak menjadi kesimpulan di rapat ini. Seperti posisinya Ibu menteri menyampaikan ke media, kebetulan dilakukan di Komisi ini. Tapi apa yang disampaikan oleh Ibu menteri belum boleh menjadi kesimpulan, keputusan rapat komisi, karena belum diagendakan secara resmi.

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih.

Ini Pak Syam ini senior sekali.

Jadi saya kira ini pun bukan untuk mengambil keputusan, hanya mendengarkan penjelasan, penjelasan informasi berarti. Supaya kita punya informasi ketika ditanya orang di luar, ditanya konsituen tanya masyarakat. Jadi dengan begitu membantu juga pemerintah untuk menjelaskan apa yang sudah mereka lakukan. Betul tidak Ibu Sumardjati, setuju? Atau ada yang lain atau kita kasih kesempatan, paling sebentar 10 menit, 15 menit paling lama.

Setuju ya kita kasih kesempatan ya. Penyakit Cacar Monyet dulu bu. Itu yang berbaya sekali yang saya lihat.

**MENTERI KESEHATAN RI:**

Baik begini Pak.

Mengenai penyakit Cacar Monyet memang asalnya dari Monyet ya Pak ya. Jadi begini Pak. Penyakit ini yang kita takutkan sekarang di dunia ini, penyakit yang ditularkan dari binatang ke manusia itu dari terakhir data kami dari waktu itu pertemuan. Itu dari 10 penyakit infeksi, 6 disebabkan oleh binatang Pak. Jadi termasuk seperti Mers Cov itu dari Onta dan sekarang ini cacar ini berasal dari monyet yang pertama memang berada di Afrika juga Pak. Saya kebetulan tadi kami berkumpul di KSP, catatan saya, saya berikan ke Wartawan, jadi belum diprint lagi, tapi yang saya hafal saja. Jadi itu berasal dari Nigeria, Kongo dan ada beberapa negara Pantai Gading. Jadi beberapa negara Afrika itu memang ada, yang kemudian sekarang ada berada di Singapura. Itu disebabkan memang oleh tentu virus dari monyet tersebut yang menularkan kepada manusia melalui dari darah misalnya dari luka

dikulit. Jadi harus memang masuk kedalam tubuh manusia. Jadi tidak bukan hanya penularan melalui ada tadi bertanya apakah dari udara, tidak. Dan ini tidak hanya dari cacar monyet ini bukan hanya dari darah, tetapi bisa dari binatang liar seperti Tikus, Tupai dan diterima melalui tadi, sekali lagi kontak darah dengan darah, cairan tubuh ataupun lesi di kulit, hewan dari hewan yang terinfeksi.

Nah ini disebut cacar monyet tadi sekali lagi penyakit zoonosis yang disebabkan dari hewan ke manusia. Sayangnya penyakit gejalanya mirip dengan penyakit-penyakit yang lain. Ini yang mungkin kita harus sangat antisipasinya, ia seperti ruang lainnya seperti kena cacar air disini atau campak atau infeksi kulit akibat dari bakteri. Jadi hampir sama yaitu demam, misalnya sakit kepala, nyeri ototot, pembesaran kelenjar getah bening yang timbul setelah dalam satu sampai 3 minggu masa inkubasi.

Nah jadi diagnosa ini memang harus melalui tentu laboratorium dari pemeriksaan virus tersebut. Nah memang penularan antar manusia jarang terjadi. Jadi harus dari binatang dalam hal ini atau juga tidak melalui dari udara ini tidak Pak. Jadi kasus kematiannya sekitar 10% dan mayoritas pada anak-anak. Ini barangkali kita memang harus hati-hati. Nah kami tentu sudah berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, terutama kalau di Singapura sudah ada, kantor kesehatan pelabuhan di Batam sudah tentu bergerak untuk bagaimana menskrining pendatang yang datang dari Singapura, tapi tentu kami bisa melihat dari demam, dalam hal ini dengan thermo scanner kita memasangnya di Tanjung Pinang dan di Batam. Kita mencoba untuk mendeteksi karane sudah dikatakan berada di Singapura. Jadi kepada masyarakat barangkali kami sangat menghimbau tentu ini lingkungan memegang peranan penting, karena itu cuci tangan atau kita menghindari kontak dengan hewan-hewan yang terinfeksi dan saya kira kita kalau misalnya kita mau pegang binatang juga tolong memakai sarung tangan ataupun masker dan melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, cuci tangan dan sebagainya ia tetap kebersihan dini nomor satu.

Mengenai vaksinasi, saya kira masih belum ada, saya kira ini karena virusnya kena biasanya faksin berasal dari virus yang penyakit tersebut. Ini ada ditulis agar melakukan vaksinasi saya kira ini belum bisa. Kalau menurut saya kenapa anuhnya belum ada, saya mau tanya. Tapi saya kira belum Pak. Jadi masih banyak sebenarnya penyakit-penyakit virus yang memang tidak mempunyai vaksinasi dalam hal ini, mungkin termasuk ini.

Demikian yang bisa saya laporkan Pak mengenai Cacar Monyet, mengenai yang meninggal Pak. Baik, ini tentu sebagai informasi saja dalam arti kami juga tadi sudah bertemu dengan KPS, bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri BPJS Ketenagakerjaan, kemudian dengan Kementerian Keuangan tadi hadir Pak Askolani, kemudian dengan IDI dari Majelis kode etik kedokteran MKEK. Dan kita memang ini kita membicarakan dari kami dari Kementerian Kesehatan, menyatakan bahwa setelah tanggal 17 April, setelah mendengar adanya beberapa yang meninggal, kami melakukan surat edaran dari Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan seluruh Dinas Kesehatan, diseluruh Provinsi agar membantu melakukan pemeriksaan kesehatan. Memang pemeriksaan kesehatan ini tidak dilakukan terhadap para petugas oleh KPU tidak ada permintaan, tentu kami juga tidak bisa masuk dalam hal ini.

Petugas pemilu ini hanya diminta surat keterangan sehat oleh KPU tadi yang diungkapkan oleh Pak Sekjen KPU. Jadi memang tidak ada pemeriksaan lengkap bagi kesehatan mereka. Kemudian surat edaran kami ini tentu ditanggapi oleh para dinas kesehatan dengan kami meminta pengiriman data mengenai tentu baik yang meninggal ataupun yang masuk kedalam rumah sakit. Kemudian kami juga sudah bertemu dengan KPU, pada waktu itu juga bersama-sama KPU itu yang hadir dari IDI, Kementerian Kesehatan, Fakultas Kedokteran Nusa Indonesia, Pak Dekan, ada Ombudsman, ada Komnasham. Kita juga membicarakan dan dalam hal ini ada keinginan dari FKUI untuk melakukan suatu penelitian untuk memberikan satu evidence data untuk kedepan itu seharusnya sebaiknya kita bagaimana untuk pemilu.

Nah mengenai angka yang kami dapat kan, kami mendapatkan sekarang sampai sampai saat ini dari 25 Provinsi, data ini memang belum lengkap, tetapi kita sudah mendapatkan angka yang meninggal sesuai dengan data KPU yaitu 485 Ibu Sumardjati. Ia saya kira kita harus mendengarkan tentu data dari KPU. Jadi 485 kemudian yang sakit sekitar 10.997 data. Kemudian data kesakitan itu

atau yang sakit, terbesar di DKI Jakarta 24% dan di Banten juga 24% diikuti oleh Jatim dan Jawa Barat.

Mengenai angka kematian tersebar di Jawa Barat 36% dan ini angka tentu berdasarkan data yang masuk. Jadi dari tadi 25 Provinsi. Kemudian Jatim 16% dalam hal ini. Kemudian data yang kami dapatkan meninggal di rumah sakit, itu lebih kecil 39% dibandingkan dengan data yang meninggal di luar rumah sakit yaitu 61%. Nah disini dapat kami mungkin saya mencoba menganalisa disini, mengapa yang di luar rumah lebih banyak. Memang kami melihat dari hasil Riskesdas tahun 2018, kalau kita melihat masyarakat kita ini memang terjadi suatu kenaikan dengan penyakit dibandingkan dengan 2013. Seperti hipertensi yang dulunya sekitar 20% sekarang sudah 34%. Dulunya diabetes 6% sekarang naik sampai 8,5%. Penyakit jantung setengah persen, sekarang satu setengah persen. Jadi kita bisa melihat masyarakat kita ini juga dengan penuh resiko penyakit.

Kemudian yang hipertensi yang tadi disebut 34%, kalau kita lihat yang diketahui menderita penyakit hipertensi, itu hanya sepertiga. Dari sepertiga yang kita ketahui itu sepertiganya yang patuh untuk mau minum obat hipertensi. Berarti ini kami selalu menyebutnya dengan silent. Jadi kita tidak tahu bahwa kita ini sebenarnya menderita hipertensi atau tidak, karena kita pernah memeriksa ataupun kita tidak menyadari bahwa pemeriksaan kesehatan bahwa sebenarnya penting. Jadi kita bisa melihat bahwa masyarakat kita ini dengan dilakukannya program Indonesia Sehat Pendekatan Keluarga, kita indeks keluarga sehat kita itu hanya mencapai 16,8%. Jadi artinya masyarakat yang sadar kesehatan adalah kurang lebih hanya 20%. Nah ini terlihat dari mereka jadi meninggal di luar rumah. Berarti memang tidak cepat untuk pergi ke fasilitas kesehatan.

Kemudian data kematian ini dari umur, kita bisa melihat data umur yang meninggal di atas usia 50 ada sampai 70 tahun bahkan lebih, itu 70 tahun 6% kalau total di atas 50 tahun itu sebesar 54%. Jadi ini kebanyakan orang-orang yang tua yang bekerja di menjadi saya menyebutnya tentu relawan atau pejuang demokrasi ini dalam hal ini mereka harusnya berterima kasih sudah mau bekerja dan kami mendengar KPU hanya mendapat memberikan honor sebesar 500 ribu. Kemudian kalau kita melihat penyakitnya, saya menggabungkannya penyakit Kardiovaskuler, jadi penyakit jantung ataupun di dalamnya ada stroke dan juga ada hipertensi-emergensi yang akhirnya menimbulkan angka kematian, itu sebesar 53%. Jadi penyakit jantung ini atau kardiovaskuler penyebab terbanyak. Kemudian kedua adalah pernafasan, yaitu termasuk asma itu sekitar 20%, kecelakaan disini 90% cukup tinggi. Yang lain seperti gagal ginjal juga bisa, diabetes melitus ada, kemudian penyakit liver atau koma hepatikum. Ini juga ini cukup besar 4% disini dan ada yang lain seperti meningitis atau keracunan. Jadi kita melihat disini kematian yang terjadi disini adalah kematian yang tentu kami melihat belum dapat ditemukan atau kita menemukan kecurigaan yang tidak wajar. Jadi wajar dijelaskan karena adanya penyakit yang menyertai dikematian ini dan dengan diberikan beban yang tentu terlalu besar, tentu ini akan menjadi pemicu dalam hal ini.

Mengenai penelitian yang dilakukan oleh yang dilakukan di RK, saya kira cukup baik, karena mereka akan melakukannya untuk bagaimana dengan membandingkan control dalam hal ini yang meninggal dan yang tidak meninggal dan melihat tentunya faktor resiko pekerjaan dengan jam yang mungkin berlebih dari jam yang di luar seharusnya kita bekerja dan factor lingkungan. Ini akan berdasarkan dan kelihatannya memang sampai saat ini kalau data kami, kematian ini adalah alami karena memang sakit dan usia tua. Dan kemudian tentu kami juga melakukan audit, medik yang berada di rumah sakit.

Mengenai otopsi verbal, itu akan dilakukan maksudnya yaitu kami sudah membicarakan itu pada yang meninggal di luar. Otopsi verbal ini adalah memang yang dimintakan artinya dikeluarkan oleh WHO karena kita harus mengetahui penyebab kematian dari seseorang dan ini memang betul ini adalah untuk ini sebab kematian ini seharusnya setiap negara harus mempunyai dan kami antara kementerian dengan kementerian memang sudah melakukan otopsi verbal tapi belum disemua provinsi. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian dan Komisi IX, yang bagus data ini berasal dari DKI Jakarta, dimana pada waktu di KPU mereka melaporkan dari 18 kematian, mereka melakukan otopsi verbal kurang

lebih sepuluh, sembilan adalah hasil audit medik. Semuanya memang penyebabnya adalah lebih banyak kerarah kardiovaskuler beberapa yang meningitis dan sebagainya.

Jadi saya kira ini memang kalau dilihat tadi kami melihat kematian ini wajar yang dapat dijelaskan penyakitnya. Kami tentu menunggu lagi laporan-laporan dari dinas kesehatan yang masih belum lengkap dan kami akan merangkumnya dalam hal ini dan kami tentu mendukung tim independent dari FKUI akan bekerja sama dengan kedokteran mereka akan melakukan suatu penelitian dengan 14 fakultas kedokteran.

Jadi demikian yang dapat saya sampaikan mengenai kematian dari tenaga KPPS atau Pemiliu tahun 2019.

**KETUA RAPAT:**

Baik terima kasih Ibu Menteri.  
Silakan.

**F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):**

Saya sedikit Pak, berkaitan tadi sudah disampaikan oleh Pimpinan, ini soal aspirasi Ibu Menteri. Yang saya sampaikan tadi atas nama dokter Vina Yanti. Itu dokter kesehatan di Kupang ya. Nah dokumennya sudah ditangan saya akan saya berikan langsung. Nanti akan saya tanyakan nanti saat RDP kemudian. Jadi saya ini tolong ditindaklanjuti sebaik-baiknya agar ada keputusan berkaitan dengan nasib dari dokter Vina Yanti ini.

Saya kira itu. Saya akan langsung serahkan Pimpinan ya.  
Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Silakan.

Ini yang jelas ini sebetulnya Pak Abidin langsung punya data. Dari daerah mana tadi Pak Abidin, Kupang ya. Ini kelihatannya mau pindah dabil ke Kupang ini.  
Baik teman-teman, begitu tadi penjelasan Ibu Menteri. Cukup ya. Ibu Sumardjati cukup.

**F-GERINDRA (DR. SUMARJATI ARJOSO, S.K.M.):**

Tidak ada diskusi, saya anggap cukup.

**KETUA RAPAT:**

Sebetulnya boleh saja diskusi, tidak ada masalah diskusi, karena kita ini waktu tadi dipatok sampai 1 jam, ini masih kita gunakan setengah jam. Jadi masih ada sebetulnya kalau mau, tapi kalau tidak mau cukupkan sampai disitu, jangan banyak-banyak.

Silakan bu.

**F-GERINDRA (DR. SUMARJATI ARJOSO, S.K.M.):**

Terima kasih Ibu Menteri untuk penjelasannya, tentu sudah komprehensif ya. Tetapi kan banyak yang meninggal di luar rumah sakit. Jadi dengan verbal opsi itu seberapa besar akurasiya, karena ini juga dipertanyakan dari IDI ya. Kemudian yang dari rumah sakit itu, seberapa lengkap rumah sakit itu dalam menentukan diagnosa. Banyak yang meninggal di kabupaten yang tidak lengkap, misalnya stroke apakah kelengkapan dari hal-hal yang terkait dengan diagnosa yang pasti itu seberapa

besar. Ini tentu perlu diteliti juga bukan hanya dengan laboratorium saja, tetapi menentukan dengan pasti. Seperti misalnya koma hepatikum, itu kan prosesnya lama, tiba-tiba orang jadi koma hepatikum. Tentu ini pertanyaan juga. Lalu meningitis itu infeksi dari mana dan sebagainya. Jadi memang perlu investigasi karena tentunya diagnosa tidak bisa diambil hanya dengan pemeriksaan yang tidak lengkap, karena mereka ini banyak di rumah sakit kabupaten meninggalnya yang tentu perawatannya tidak lengkap.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Silakan bu.

**MENTERI KESEHATAN RI:**

Baik Ibu.

Tadi kan dikatakan akan ada tim independent dari FKUI tadi yang saya kira akan melanjutkan suatu pemeriksaan, tapi kami meminta tidak tumpang tindih, jadi artinya audit medik ini mungkin mau diperdalam. Saya kira ini lebih baik. Nanti kita menunggu karena mereka tentu mau melihat evidence based ini bagaimana.

Kemudian kedua, tadi mengenai otopsi verbal. Ini dari WHO bu. Jadi ini memang lengkap dan ketepatan diagnosis itu sampai 80%. Jadi karena kami sedikit agak tadi dibicarakan, IDI saya kira ini atau wartawan atau apa menulis, bahwa otopsi verbal tidak bisa menanyakan kepada korban, ia korban sudah meninggal, bagaimana mau tanya begitu.

Jadi saya kira memang kita harus lakukan kepada ini yang sudah dibuat oleh WHO dengan pertanyaan pada waktu di KPU kami sudah membicarakan hal ini dan ini betul-betul pertanyaannya dan kami membenarkan jika nanti tim independent ingin menambah suatu pertanyaan-pertanyaan, sehingga lebih lagi kejelasannya, ketepatannya insya allah kita akan dapatkan. Jadi saya kira tidak ada jalan lain. Tadi juga dibicarakan oleh Prof. Agus, bahwa tentu otopsi dari ini adalah yang terakhir. Ini jadi memang otopsi itu berdasarkan data. Jadi otopsi verbal ini memang tepat, otopsi verbal ini legitimate dikatakan oleh tadi memang kemudian diantara itu memang ada otopsi klinis jadi tambahan-tambahan tadi baru bilamana dicurigai ketidak wajarannya dan merupakan itu ranah dari Polisi dan itu baru dilakukan otopsi forensik.

**KETUA RAPAT:**

Saya kira cukup ya.

**F-PDIP (ABIDIN FIKRI, S.H.):**

Pimpinan. Jadi saya dengan penjelasan Ibu Menteri semangkin terang benderang Pak, bahwa yang beredar spekulasinya wafatnya itu kan karena racun segala macam. Nah dengan penjelasan Ibu Menteri, kita mendapat keyakinan dan terang benderang bahwa yang wafat itu adalah tidak ada indikasi seperti yang disampaikan medsos hoax tentang keracunan atau diracun.

Saya kira itu pimpinan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ia baik. Tapi kan tidak ada kesimpulan kata Pak Syam. Pak Syam itu sudah bilang tidak ada kesimpulan. Jadi silakan informasi sudah disampaikan, tentu kami dari Komisi IX Bu, mengucapkan

apresiasilah kepada kementerian kesehatan yang sudah memulai investigasi, walaupun menurut saya agak telat sedikit. Harusnya kita pikirkan dari awal pelaksanaan pemilu, kemenkes sudah ada di sana, seharusnya ada itu, termasuk soal tadi yang fundamental menurut saya. Pemeriksaan kesehatan itu tidak dilakukan, kasih surat saja itu, itu kan fatal sekali. Jadi mungkin kedepan ini catatan penting yang harus diperbaiki oleh kementerian kesehatan. Jadi mudah-mudahan ini jangan sampai petugasnya lebih banyak lewat, in caleg aman-aman saja ini semua, alhamdulillah tidak ada bermasalah. Hipertensi tapi bisa disembuhkanlah insya allah.

Demikian Bapak-Ibu, saudara, terima kasih para Bapak-bapak dari Kementerian Lembaga yang lain yang sudah bersedia berkenan untuk menunggu sekitar 30 menit dari jadwal yang ditentukan tadi dan kita mengambil dua keputusan, pertama rapat ini ditunda, terkait dengan penyelesaian BPJS. Kemudian yang kedua, rapat kita akan dilanjutkan atau dibuka lagi terkait dengan hal ini, pada tanggal 27 Mei 2019.

Demikian Bapak-Ibu, saudara, jika tidak ada ingin disampaikan lagi, ijin saya menutup rapat ini dengan bacaan Hamdallah.

*Alhamdulillah hirrobil alamin.*

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

**RAPAT DITUTUP PUKUL 14:26 WIB**

Jakarta, 14 Mei 2019

Ketua rapat,

**DR. SALEH PARTANOAN DAULAY, M.Ag, M. Hum, MA**

**ANGGOTA:-460**